

SEKTOR JASA KEUANGAN TERJAGA STABIL DALAM MENGHADAPI ERA SUKU BUNGA GLOBAL TINGGI UNTUK WAKTU LEBIH LAMA (*HIGHER FOR LONGER*)

"Sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko *higher for longer* suku bunga global"



PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

Global

- Kebijakan The Fed diprediksi lebih *hawkish*.
- Otoritas moneter Eropa kembali menaikkan suku bunga.
- Pemulihan ekonomi Tiongkok belum sesuai ekspektasi

- Tekanan *outflow* dari pasar *emerging markets* termasuk Indonesia disebabkan berlanjutnya kenaikan *yield* surat utang di Amerika Serikat dan penguatan USD.
- Volatilitas di pasar keuangan, baik di pasar saham, obligasi, dan nilai tukar juga dalam tren meningkat.

Domestik

- Tingkat inflasi dalam negeri meningkat 3,27% yoy, sejalan dengan ekspektasi pasar sebesar 3,3%.
- Kinerja sektor korporasi relatif masih baik dengan indikator PMI Manufaktur yang berada di zona ekspansi.

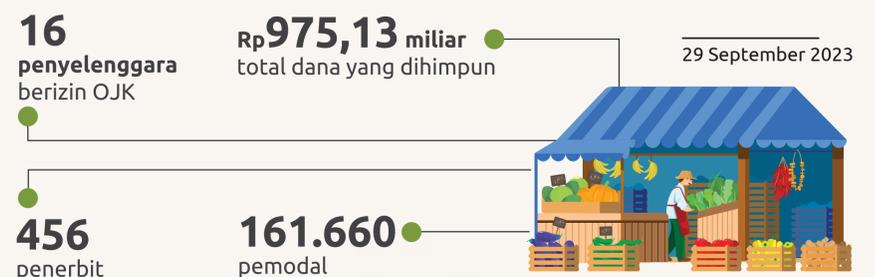
Neraca perdagangan mencatatkan surplus.

PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

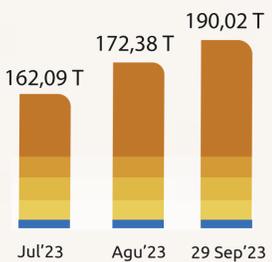
Pasar Modal



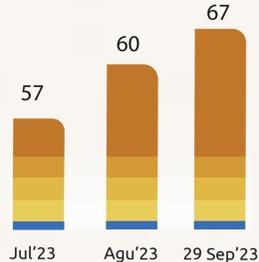
Securities Crowdfunding (SCF)



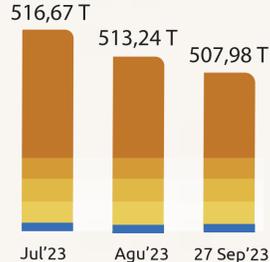
Nilai Penghimpunan Dana



Emiten Baru



NAB Reksa Dana

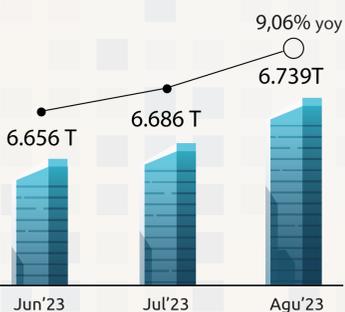


Perdagangan Karbon



Perbankan

Kredit Perbankan



Dana Pihak Ketiga



Kredit restrukturisasi Covid-19 terus menurun



Kredit Investasi



Kredit Modal Kerja



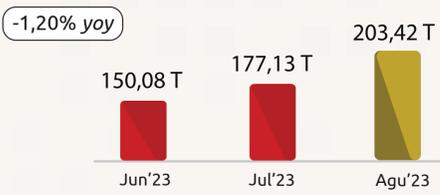
Kredit Konsumsi



| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| CAR 27,66% Agu'23 | AL/DPK 26,49% Agu'23 | AL/NCD 118,50% Agu'23 | NPL Gross 2,50% Agu'23 | NIM 4,87% Agu'23 | RoA 2,74% Agu'23 |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

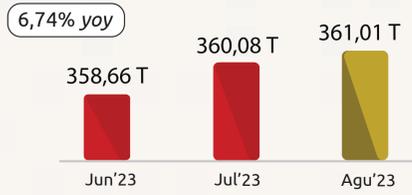
Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Pendapatan Premi Asuransi



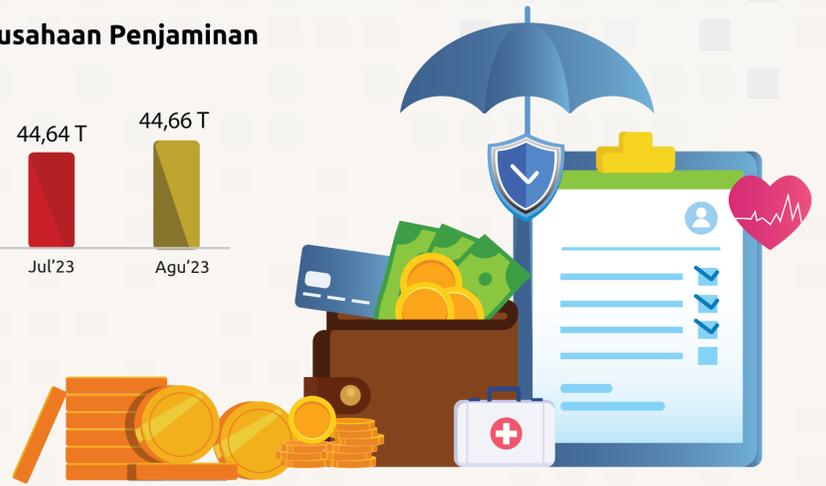
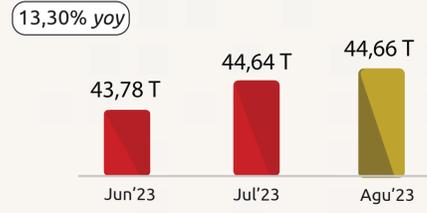
RBC Asuransi Umum
310,63%
Agu'23

Aset Dana Pensiun



RBC Asuransi Jiwa
452,31%
Agu'23

Aset Perusahaan Penjaminan

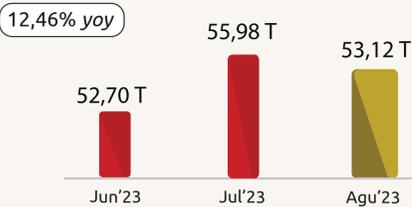


Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Piutang Pembiayaan



Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending



Pembiayaan Modal Ventura



NPF Perusahaan Pembiayaan (*gross*)
Agu'23 **2,66%**

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan
Agu'23 **2,22x**

TWP 90 Fintech P2P Lending
Agu'23 **2,88%**

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

105

Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang tercatat di OJK



| | | | |
|--|--|--|---|
| Aggregator 43 Penyelenggara | Financial Planner 4 Penyelenggara | Transaction Authentication 8 Penyelenggara | Insurance Hub 1 Penyelenggara |
| Innovative Credit Scoring 19 Penyelenggara | Insurtech 3 Penyelenggara | Tax & Accounting 2 Penyelenggara | Wealth Tech 2 Penyelenggara |
| Financing Agent 6 Penyelenggara | Online Distress Solution 1 Penyelenggara | Regtech PEP 1 Penyelenggara | Regtech - Esign 5 Penyelenggara |
| Funding Agent 3 Penyelenggara | E-KYC 6 Penyelenggara | Property Investment Management 1 Penyelenggara | |

Edukasi dan Pelindungan Konsumen

227.328 layanan
(Januari s.d 30 September 2023)

57 pengaduan berindikasi pelanggaran

1.700 sengketa masuk ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

16.555 pengaduan



Selesai oleh Internal Dispute Resolution 87,04%; Dalam Proses 12,96%

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

1.484 entitas keuangan ilegal dihentikan

Investasi Ilegal
18

Pinjaman Online Ilegal
1.466



8.047 pengaduan yang diterima

Investasi Ilegal
337

Pinjaman Online Ilegal
7.710

Data Januari s.d 6 Oktober 2023

Program literasi dan edukasi keuangan



Kegiatan Edukasi
2.058 kegiatan
459.111 peserta

Januari s.d 30 September 2023



Sikapi Uangmu
323 konten Edukasi
1.505.182 penonton

Januari s.d 30 September 2023

LMSKU OJK



45.894 kali akses modul
37.320 sertifikat kelulusan modul

Januari s.d 30 September 2023

Arah Kebijakan OJK

OJK mengambil langkah kebijakan sebagai berikut untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam perekonomian nasional.



Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam rangka menjaga ketahanan dan stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) pada saat terjadinya fluktuasi di pasar keuangan, LJK diharapkan untuk terus memonitor erat perkembangan portfolio investasi yang dimilikinya.



Kebijakan Penguatan SJK dan Infrastruktur Pasar

- Menerbitkan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dalam rangka penguatan penerapan prinsip tata kelola pada Bank dengan dukungan manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi.
- Memerintahkan perbankan untuk memblokir sejumlah rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, tidak hanya untuk rekening yang terkait judi *online* tapi berlaku juga untuk rekening bank yang digunakan untuk tindak pidana ekonomi lainnya termasuk investasi ilegal dan pinjol ilegal.
- Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan PPATK untuk menangani berbagai tindak kejahatan yang memanfaatkan sistem perbankan.
- Mewujudkan komitmen untuk mengakselerasi dekarbonisasi ekonomi melalui peluncuran dan implementasi perdagangan perdana Unit Karbon.
- Mendukung inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan, salah satunya melalui penyusunan RPOJK mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
- Menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Pasar Modal sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM SJK khususnya bagi industri Pasar Modal.
- Menyusun RPOJK mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan kredit atau pembiayaan syariah dan produk pada lini usaha *suretyship* atau *suretyship* syariah.
- Melakukan kajian untuk merumuskan kerangka pengaturan terkait pengelompokan perusahaan asuransi berdasarkan tingkat permodalan yang dimiliki dalam rangka mendorong konsolidasi pada sektor industri asuransi.



Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- Melakukan *monitoring* POJK *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS) agar pada saat batas waktu *spin-off* tahun 2026, proses *spin-off* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah:
 - Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah ("SICANTIKS") yang mendorong hadirnya Duta Literasi Perempuan Keuangan Syariah.
 - Forum edukasi dan temu bisnis (FEBIS) antara santri UMKM, mahasiswa dan Industri Jasa Keuangan Syariah.





Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)

- Menyusun *Masterplan* dan *Roadmap* Bidang IAKD termasuk aset kripto.
- Menyusun Rancangan POJK dan ketentuan pelaksanaan di ITSK dalam rangka mengembangkan inovasi di sektor keuangan dan memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara ITSK.
- Mengembangkan *Digital Innovation Center* sebagai *innovation hub* dan penguatan fungsi *Regulatory Sandbox*.
- Berkoordinasi dengan Bappebti terkait peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto sebagaimana diatur dalam UU P2SK.
- Berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam rangka membahas pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam UU P2SK.



Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Pelindungan Konsumen

- Bersama TPAKD dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulselbar menginisiasi program LAYAnan liteRasi dan inKlusi keuangan ke daerahKU ("LAYARKU"), yang bertujuan untuk memaksimalkan peran IJK yang memiliki jaringan kantor di seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulselbar untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat pedesaan.
- Bersama TPAKD dan FKIJK Provinsi Jawa Tengah menginisiasi program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah yang bertujuan sebagai Pusat Informasi Keuangan yang menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif.



Penguatan Tata Kelola OJK

- Memperkuat efektivitas pengawasan dengan penerapan standar kualitas melalui fungsi *quality assurance* dan *quality control* di seluruh sektor.
- Memperkuat governansi dan integritas SJK dengan mengadakan Forum penguatan governansi dan integritas SJK serta Forum Penguatan Laporan Keuangan SJK bekerjasama dengan Kementerian BUMN.
- Meningkatkan kapasitas audit internal dan audit investigasi melalui penyesuaian kebijakan, pedoman, serta penerapan *data analytic*.
- Menyikapi gangguan layanan sistem informasi yang terjadi beberapa waktu lalu di OJK, OJK telah melakukan langkah-langkah penanganan sehingga proses *recovery* berjalan dengan cepat dan secara bertahap sistem layanan informasi terkait OJK sudah dapat diakses kembali. Upaya korektif yang terukur terus dilakukan dalam rangka pemulihan secara penuh agar OJK dapat kembali memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat dan industri jasa keuangan. Ke depan, OJK akan terus memperkuat upaya antisipasi gangguan sistem informasi dengan bekerja sama dengan *stakeholder* terkait sebagaimana telah dilakukan selama ini.



Kebijakan Penanganan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perhatian Khusus

- Penyidik OJK telah menyelesaikan total 110 perkara (85 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara IKNB).
Data 2014 s.d 29 September 2023
- 89 perkara telah diputus oleh pengadilan (82 perkara *in kracht* dan 7 perkara tahap kasasi)
Data 2014 s.d 29 September 2023

Ke depan, dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan kontribusi SJK dalam perekonomian nasional, OJK mempererat koordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan bekerja sama dengan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil.



Siaran Pers OJK Nomor SP 138/GKPB/OJK/X/2023